

Sosialisasi Peran Vital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja

Komang Widhya Sedana Putra P^{1*}, Ni Komang Ayulyantari², Kadek Wulandari Laksmi P³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Bali, Indonesia

Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya Denpasar Selatan Bali, Indonesia

Email: ^{1*}widhyasedana@undiknas.ac.id, ²omangyuliantari@gmail.com, ³wulandarilaksmi@undiknas.ac.id

(*: corresponding author)

Abstrak-BPJS Ketenagakerjaan memainkan peran vital dalam memberikan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di Indonesia, melindungi mereka dari risiko finansial akibat kecelakaan kerja. Program ini mencakup biaya pengobatan dan kompensasi kehilangan pendapatan, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta memberikan rasa aman di lingkungan kerja. Tujuan kegiatan ini adalah menganalisis pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam jaminan kecelakaan kerja dan menyoroti manfaat pelaksanaannya. Masalah yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pekerja mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan meliputi kajian literatur, survei kesadaran pekerja, serta sosialisasi dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sosialisasi diadakan pada tanggal 4 Juli 2024 untuk pekerja di Bangli. Hasil menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan loyalitas pekerja. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman pekerja tentang pentingnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam hal perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan akibat sakit. Kesimpulannya, sosialisasi dan pendampingan yang tepat dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, sehingga mendukung kesejahteraan dan keamanan pekerja di lingkungan kerja.

Kata Kunci: Ketenagakerjaan; Jaminan Kecelakaan Kerja; Perlindungan.

Abstract-BPJS Ketenagakerjaan plays a vital role in providing workplace accident insurance for workers in Indonesia, protecting them from financial risks arising from workplace accidents. This program covers medical expenses and income loss compensation, thereby helping to improve the well-being of workers and their families while ensuring safety in the workplace. The aim of this activity is to analyze the importance of BPJS Ketenagakerjaan in workplace accident insurance and highlight the benefits of its implementation. The identified problem is the lack of understanding and awareness among workers about the importance of BPJS Ketenagakerjaan. The methods used include literature review, worker awareness surveys, and socialization with BPJS Ketenagakerjaan participants. Socialization was conducted on July 4, 2024, for workers in Bangli. Results indicate that BPJS Ketenagakerjaan not only provides financial protection but also contributes to increased productivity and worker loyalty. This activity successfully enhanced workers' understanding of the importance of BPJS Ketenagakerjaan membership, especially regarding protection against workplace accident risks and income loss due to illness. In conclusion, proper socialization and assistance can significantly raise workers' awareness and understanding of the importance of BPJS Ketenagakerjaan, thereby supporting the welfare and security of workers in the workplace.

Keywords: Employment; Occupational Accident Insurance; Protection.

1. PENDAHULUAN

Pancasila, selain menjadi landasan filosofis bangsa Indonesia, juga berfungsi sebagai dasar negara. Pembangunan ketenagakerjaan berkaitan erat dengan sila kelima Pancasila yang mengungkapkan "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," serta Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan bahwa setiap orang di Indonesia berhak mendapatkan pekerjaan, imbalan yang adil, dan perlakuan adil dalam hubungan kerja. Prinsip ini sejalan dengan konsep keadilan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pembangunan ketenagakerjaan meliputi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan manusia secara menyeluruh di Indonesia dengan tujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, termasuk penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan perlindungan hak-hak pekerja. Permasalahan utama yang dihadapi oleh mitra atau masyarakat adalah kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, imbalan yang adil, dan perlakuan adil dalam hubungan kerja. Sasaran program PKM dalam konteks ini adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui implementasi prinsip keadilan sosial yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Prioritas program meliputi sosialisasi hak-hak pekerja, peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan, serta perlindungan hak-hak pekerja dengan memberikan edukasi mengenai undang-undang ketenagakerjaan dan mekanisme perlindungan hukum.

Salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diterapkan pada tenaga kerja Indonesia adalah jaminan sosial (Tsabitah & Hoesin, 2024). Jaminan sosial ini mencakup sejumlah program yang dirancang demi menyediakan perlindungan kepada pekerja, seperti asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Keberadaan jaminan sosial diharapkan dapat memperbaiki ketenangan dan produktivitas pekerja, karena mereka dilindungi dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama bekerja. Secara keseluruhan, ketentuan dalam Pasal

2 UUK ini menggambarkan komitmen negara untuk menjamin hak-hak pekerja, memperbaiki kualitas hidup mereka, serta mewujudkan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat membawa manfaat tidak hanya bagi para pekerja, tetapi juga untuk seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan. Semua pekerja di Indonesia dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk perlindungan sosial dan profesional. Pemerintah memberikan jaminan sosial tenaga kerja, yang melindungi pekerja dengan menyediakan bantuan keuangan untuk menggantikan pendapatan yang hilang atau berkurang, serta layanan terkait kejadian atau kondisi seperti kecelakaan kerja, sakit, kehamilan, pensiun, atau kematian (Islam et al., n.d.).

Jaminan sosial ketenagakerjaan meliputi komitmen nasional yang diamanatkan dan meliputi hak asasi manusia yang berlaku universal bagi seluruh warga negara. Ini bertujuan demi menyediakan perlindungan, kesejahteraan, dan ketenangan pikiran dalam menjalankan hubungan kerja (Nur Fath-Hiah & Azizaton Nafi, n.d.). Jaminan kecelakaan kerja dianggap sebagai “obligation” pemerintah dan diterapkan untuk kepentingan tenaga kerja (Ayu et al., n.d.). Tenaga kerja di Indonesia sangat membutuhkan jaminan sosial untuk membuat mereka lebih fokus untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Ini akan memperbaiki kesejahteraan tenaga kerja dan membantu keluarga mereka jika kecelakaan kerja terjadi (Waliyuddin Zakiy & Azizaton Nafi, n.d.).

Karena pentingnya peran pekerja bagi perusahaan, pekerja harus memiliki perlindungan yang memadai selama mereka bekerja di tempat kerja mereka. Demi menyediakan perlindungan terhadap tenaga kerja, juga dipertimbangkan risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Ini berarti bahwa keselamatan kerja bukan hanya tanggung jawab individu yang bekerja, tetapi juga harus ada sistem dan peraturan yang memastikan hal ini terjadi (Prihantini & Sarjana, 2022). Produksi tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, karena tenaga kerja meliputi salah satu komponen penting ekonomi negara. Tenaga kerja adalah orang yang menggunakan pemikiran dan tenaga dalam aktivitasnya. Akibatnya, sangat penting demi menyediakan penghargaan dan jaminan atas kinerja pegawai atau tenaga kerja dalam situasi ini. Termasuk dalam kategori ini adalah pegawai negeri, pegawai formal, pegawai informal, dan pengangguran (Saputra et al., 2024). Pemerintah telah mengintegrasikan jaminan sosial untuk tenaga kerja sebagai ungkapan terima kasih atas kontribusi mereka di Indonesia. Salah satu implementasinya adalah melalui BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan), yang disediakan bagi pekerja yang bekerja di berbagai perusahaan atau organisasi. (Jurnal et al., 2020).

Namun, meskipun program jaminan kecelakaan kerja mudah diakses, ada beberapa hambatan yang menghambatnya. Beberapa di antaranya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah tentang program jaminan sosial, dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya program ini untuk pekerja. Masalah keselamatan kerja masih sering terabaikan oleh kebanyakan pekerja. BPJS Ketenagakerjaan menyoroti pentingnya keselamatan di tempat kerja dalam konteks dunia usaha, karena kecelakaan kerja bukan hanya berpotensi mengakibatkan kematian, tetapi juga dapat mempengaruhi produktivitas secara signifikan. Setiap perusahaan atau individu yang menyangkal kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka dapat menghadapi tantangan serius terkait dengan kejadian tersebut (Fadia Siwi, 2023). Untuk memperbaiki pemahaman dan kesadaran para pekerja, Upaya pengabdian masyarakat dilakukan dengan melakukan sosialisasi untuk menjelaskan betapa pentingnya jaminan kecelakaan kerja untuk para pekerja dan manfaat apa saja yang akan para pekerja terima. Dalam sosialisasi ini menyoroti pentingnya pengguna BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja.

Berdasarkan penelitian (Rini et al., 2023), teridentifikasi bahwa implementasi jaminan sosial terkait kecelakaan kerja belum optimal, terutama akibat permasalahan seperti keterlambatan dan kurangnya tindakan dari perusahaan. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pelaksanaan program yang perlu diperbaiki. Penelitian ini dapat berfokus pada bagaimana strategi sosialisasi dan pendampingan yang lebih baik dapat mengatasi permasalahan implementasi ini dan meningkatkan efektivitas program BPJS Ketenagakerjaan. Sementara itu, penelitian (Supadmo, 2023) menegaskan kedudukan BPJS dalam pelaksanaan jaminan sosial, namun tidak mengeksplorasi bagaimana kewajiban perusahaan dalam menerapkan program ini secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian ini juga dapat mengeksplorasi gap antara kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan praktik di lapangan, serta bagaimana sosialisasi dan pendampingan dapat memperbaiki kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.

Sosialisasi ini sangat bermanfaat untuk berkomunikasi secara langsung antar penyelenggara dengan para peserta dengan tujuan memperkenalkan BPJS Ketenagakerjaan secara menyeluruh. Kepribadian dan identitas seseorang sangat dipengaruhi oleh komunitas tempat mereka berada dan interaksi mereka dengan orang lain. Promosi yang diberikan melalui sosialisasi adalah salah satu jenis pemasaran. Ini adalah contoh kampanye yang menggunakan pendekatan komunikasi yang efektif untuk mempengaruhi pelanggan dan menarik perhatian mereka untuk program BPJS Ketenagakerjaan yang tersedia. Selain itu, promosi dan sosialisasi harus membangun hubungan jangka panjang dengan peserta melalui layanan dan pengalaman yang baik (Fadia Siwi, 2023). Dengan memahami manfaat dan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, masyarakat akan dapat lebih peka akan

pentingnya menjaga masa depan mereka. Pengabdian ini bermaksud demi memperbaiki pemahaman dan kesadaran karyawan akan pentingnya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Melalui kegiatan ini, dilakukan sosialisasi mengenai manfaat yang diperoleh karyawan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam hal perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan terhadap kehilangan penghasilan akibat sakit (Jaminan Kecelakaan Kerja). Selain itu, dilakukan pula pendampingan dalam pengelolaan administrasi terkait tagihan dari rumah sakit, serta pentingnya kelengkapan berkas laporan JKK. Tujuan dari pengabdian ini diharapkan sanggup menyediakan kontribusi positif dalam peningkatan kesadaran karyawan dan pengelolaan yang lebih baik terhadap manfaat BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dapat memperbaiki kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja di tempat kerja.

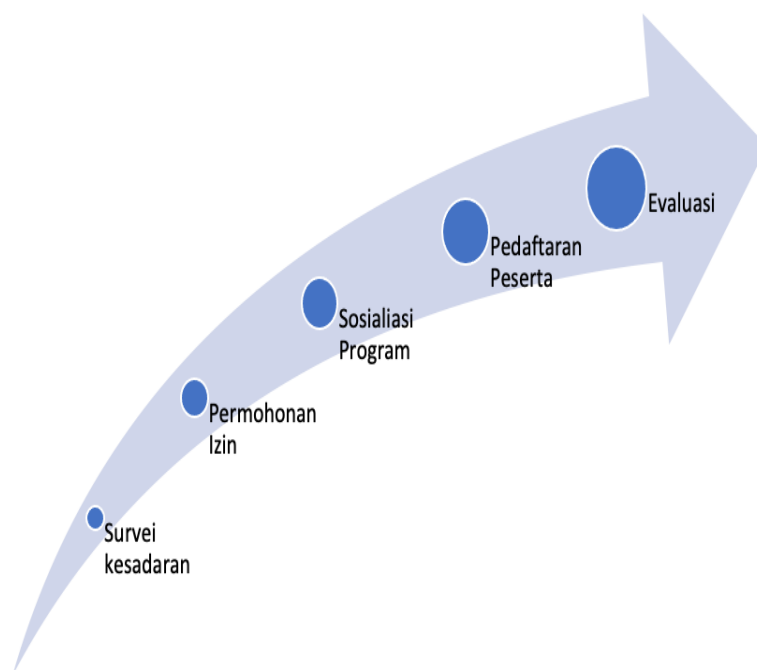
2. METODE PELAKSANAAN

2.1 Solusi yang Ditawarkan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pekerja mengenai pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, dengan fokus pada perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan terhadap kehilangan penghasilan akibat sakit. Solusi yang ditawarkan meliputi sosialisasi informasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan, serta pendampingan dalam pengelolaan administrasi terkait tagihan dari rumah sakit dan kelengkapan berkas laporan JKK. Dengan demikian, diharapkan pekerja dapat memanfaatkan layanan BPJS secara optimal dan memahami hak-hak mereka.

2.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini melibatkan beberapa tahap yang sistematis. Pertama, mengikuti penelitian sebelumnya yang dilakukan (Purba et al., 2021) yaitu survei untuk mengetahui seberapa sadar pekerja akan pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Flowchart tahapan metode pendekatan dapat dilihat dalam gambar berikut:



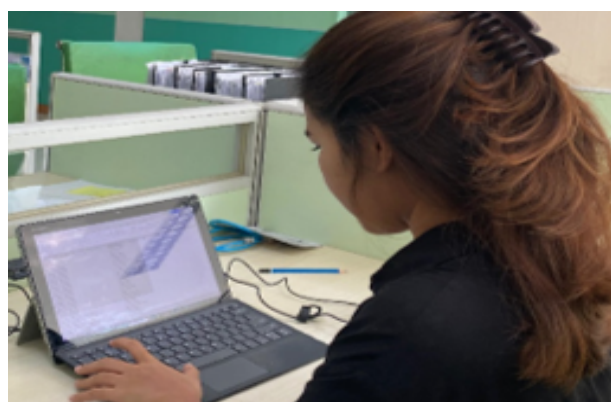
Gambar 1. Gambaran Proses Metode Penelitian.

Seperti yang ditunjukkan gambar diatas, setelah dilaksanakan survei dilanjutkan permohonan izin diajukan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan sosialisasi. Sosialisasi diadakan pada tanggal 4 Juli 2024 di Bangli, yang mencakup presentasi program BPJS Ketenagakerjaan dan diskusi interaktif.



Gambar 2. Sosialisasi terkait Program BPJS Ketenagakerjaan

Setelah sosialisasi, proses pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan dimulai, dan pendampingan diberikan dalam pengelolaan administrasi terkait tagihan rumah sakit serta pelaporan JKK.



Gambar 3. Evaluasi kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan telah tercapai dan untuk mengamati perubahan yang terjadi setelah sosialisasi selesai.

2.3 Pengenalan BPJS Ketenagakerjaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta dan keluarganya memiliki kebutuhan dasar yang layak. BPJS Ketenagakerjaan juga bertanggung jawab atas penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2004 Tentang Jaminan Sosial (Kusuma et al., 2024). BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta dan keluarganya memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.

2.4 Prinsip-Prinsip Operasional BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan menjalankan sistem jaminan sosialnya dengan prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, dan partisipasi wajib. Dana yang dikelola oleh BPJS diharapkan digunakan secara adil demi kepentingan semua peserta dan keluarganya (Ilwira Fakhurrrazi Lubis, 2023).

2.5 Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Salah satu program jaminan sosial yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Program ini bertujuan untuk menyediakan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja yang mungkin dialami oleh pekerja selama menjalankan tugasnya (Salahuddin et al., n.d.). JKK adalah bentuk manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta jika mereka mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat dari lingkungan kerja mereka (Febrianti et al., n.d.). Kecelakaan kerja dapat terjadi mulai dari perjalanan dari rumah ke tempat kerja hingga kembali ke rumah, serta penyakit akibat dari lingkungan kerja.

2.6 Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program jaminan kecelakaan kerja meliputi solusi terbaik untuk mengatasi risiko yang tak terduga di tempat kerja. Penting bagi pekerja untuk memiliki perlindungan melalui JKK guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Pratiwi et al., n.d.). Jika tenaga kerja mengalami kecelakaan kerja, mereka akan kehilangan penghasilan

karena tidak dapat melakukan pekerjaan akibat sakit, cacat, atau meninggal dunia, sehingga mengurangi penghasilan keluarga. JKK memberikan kompensasi berupa uang atau pelayanan kesehatan (Marco Orias, 2023).

2.7 Program Jaminan Kematian (JKM)

BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memastikan perlindungan sosial bagi pekerja di Indonesia. Selain JKK, BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program Jaminan Kematian (JKM) yang memberikan santunan kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja atau penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban finansial keluarga yang ditinggalkan serta memberikan jaminan keamanan sosial dalam situasi yang tidak terduga.

2.8 Program Jaminan Hari Tua (JHT)

BPJS Ketenagakerjaan juga menawarkan Jaminan Hari Tua (JHT) yang memungkinkan pekerja untuk mempersiapkan masa pensiunnya dengan lebih baik. Melalui kontribusi rutin dari peserta dan perusahaan, dana ini dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk memastikan keberlanjutan program jaminan sosial. Dengan demikian, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan perlindungan jangka pendek terhadap risiko kecelakaan kerja, tetapi juga memberikan jaminan jangka panjang untuk kesejahteraan finansial peserta di masa pensiun.

2.9 Prosedur Kerja

Prosedur kerja dalam kegiatan ini meliputi persiapan survei dengan menyiapkan kuesioner untuk mengetahui tingkat kesadaran pekerja tentang BPJS Ketenagakerjaan, pelaksanaan survei untuk mengumpulkan data, serta koordinasi dengan Dinas untuk jadwal sosialisasi. Pada tahap sosialisasi, presentasi program BPJS Ketenagakerjaan disampaikan, diikuti dengan diskusi interaktif. Pendaftaran peserta BPJS Ketenagakerjaan dilakukan setelah sosialisasi, dan pendampingan administrasi diberikan untuk mengelola tagihan rumah sakit dan pelaporan JKK. Evaluasi akhir dilakukan dengan mengumpulkan feedback dari peserta sosialisasi dan melakukan evaluasi untuk perbaikan kegiatan di masa depan. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan pengabdian dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pekerja tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap risiko kecelakaan kerja dan kehilangan penghasilan akibat sakit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Persoalan Mitra atau Masyarakat Sasaran Program

Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara berkala berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan. Survei menunjukkan bahwa persentase responden yang peka terhadap manfaat JKK meningkat dari 10% menjadi 70%. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan kecelakaan kerja, yang dapat memberikan perlindungan finansial berupa kompensasi jika terjadi kecelakaan kerja. Peningkatan pemahaman ini merupakan hasil langsung dari kegiatan sosialisasi yang intensif dan edukatif.

3.2 Partisipasi Masyarakat Sasaran Program

Partisipasi masyarakat dalam program ini cukup tinggi. Mereka aktif mengikuti sosialisasi dan diskusi interaktif yang diselenggarakan. Masyarakat juga berpartisipasi dalam proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan pendampingan pengelolaan administrasi. Tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program JKK semakin meningkat, ditunjukkan dengan semakin banyaknya masyarakat yang mendaftar dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

3.3 Luaran yang Dihasilkan

Jenis luaran yang dihasilkan dari kegiatan program ini antara lain:

Tabel 1. Tabel Luaran Yang Dihasilkan

Category	Sebelum	Sesudah
Peningkatan Kesadaran	Low	High
Pendaftaran Peserta	Low	High
Pengelolaan Administrasi	Low	High
Sosialisasi Berkala	Low	High

a. Peningkatan Kesadaran:

1. Sebelum Program: Kesadaran masyarakat tentang pentingnya program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Banyak pekerja yang belum memahami manfaat dan perlindungan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
2. Sesudah Program: Setelah sosialisasi dan edukasi dilakukan, kesadaran masyarakat meningkat signifikan. Mereka lebih memahami pentingnya menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan manfaat yang didapatkan.
- b. Pendaftaran Peserta:
 1. Sebelum Program: Jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan masih rendah. Banyak pekerja yang belum terdaftar atau bahkan tidak mengetahui cara pendaftaran.
 2. Sesudah Program: Jumlah pekerja yang mendaftar meningkat tajam. Proses sosialisasi membantu mereka memahami cara pendaftaran dan pentingnya menjadi anggota.
- c. Pengelolaan Administrasi:
 1. Sebelum Program: Pekerja kurang memahami bagaimana mengelola administrasi terkait klaim JKK. Banyak yang kesulitan dalam melengkapi berkas dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
 2. Sesudah Program: Dengan adanya pendampingan, pekerja menjadi lebih mahir dalam mengelola administrasi klaim JKK. Mereka lebih paham tentang kelengkapan berkas yang diperlukan dan proses yang harus diikuti.
- d. Sosialisasi Berkala:
 1. Sebelum Program: Sosialisasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara sporadis dan tidak teratur, sehingga informasi yang diterima masyarakat kurang memadai.
 2. Sesudah Program: Sosialisasi dilakukan secara berkala dan terstruktur, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara signifikan. Masyarakat lebih sering mendapatkan informasi terbaru dan akurat mengenai program BPJS Ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan administrasi berhasil meningkatkan kesadaran, pendaftaran, pengelolaan administrasi, dan frekuensi sosialisasi yang berkala. Hal ini berdampak positif pada pemahaman dan kesejahteraan pekerja dalam memanfaatkan program BPJS Ketenagakerjaan.

3.4 Implikasi Tindak Lanjut, Dampak, Pembelajaran, dan Pengembangan Program

- a. Implikasi Tindak Lanjut:

Untuk tindak lanjut, program ini perlu terus dijalankan secara berkelanjutan dengan fokus pada peningkatan prosedur pendaftaran dan pelaporan kecelakaan kerja. Selain itu, perlu ada peningkatan kolaborasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian dan rumah sakit, untuk mempermudah proses klaim JKK.
- b. Dampak:

Program ini memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Dengan semakin banyaknya pekerja yang terdaftar, diharapkan akan mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh keluarga pekerja jika terjadi kecelakaan kerja. Peningkatan pemahaman ini juga diharapkan akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan bagi karyawan, yang dapat merasa lebih aman dan terlindungi jika mereka tahu apa yang mereka miliki. Ini akan menghasilkan peningkatan kinerja dan produktivitas di tempat kerja.
- c. Pembelajaran:

Dari program ini, dapat dipelajari bahwa sosialisasi yang efektif dan edukatif sangat penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat juga menjadi kunci suksesnya program ini. Pendampingan administrasi mempercepat proses klaim dan memastikan kelengkapan berkas laporan JKK, yang membantu pekerja memahami proses klaim dan memastikan bahwa pekerja mendapatkan kompensasi yang tepat dan memadai.

3.5 Pengembangan Program

Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan memperbaiki prosedur pendaftaran dan pelaporan kecelakaan kerja. Selain itu, perlu adanya program pelatihan tambahan bagi masyarakat tentang pengelolaan administrasi klaim JKK. Perlu juga dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi ke daerah-daerah lain yang belum terjangkau. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan finansial melalui BPJS Ketenagakerjaan.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang mengimplementasikan sosialisasi dan pendampingan yang tepat dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang BPJS Ketenagakerjaan. Melalui metode komunikasi yang mendalam, studi kasus, testimonial, serta pelatihan dan sesi konsultasi individual yang rutin, karyawan tidak hanya menjadi lebih

terinformasi tetapi juga lebih percaya diri dalam mengelola klaim dan menghadapi risiko terkait pekerjaan. Pendekatan holistik ini telah menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung, serta berkontribusi pada peningkatan produktivitas keseluruhan tim.

5. ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus atas bimbingan dan pendampingan berharga dari BPJS TK Cabang Gianyar dalam kegiatan pengabdian ini. Bantuan yang diberikan telah sangat membantu meningkatkan pemahaman kami tentang pentingnya keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan, terutama dalam hal perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan penggantian penghasilan akibat sakit.

Pendampingan ini tidak hanya membantu kami dalam mengelola klaim dan administrasi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri dalam menghadapi potensi risiko di tempat kerja. Kami menghargai komitmen BPJS TK Cabang Gianyar dalam memastikan kelancaran dan efisiensi setiap proses yang kami lalui.

Dukungan dan kontribusi BPJS TK Cabang Gianyar telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi kami sebagai individu dan seluruh lingkungan kerja kami. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan mendukung, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi semua anggota tim kami.

DAFTAR PUSTAKA

- Marco Orias. (2023). 534-Article Text-2706-1-10-20230723. *Jurnal PADI – Pengabdian Masyarakat Dosen Indonesia*, 6(P-ISSN: 2621– 3524 e-ISSN: 2621– 3524), 21–26.
- Ilwira Fakhurrazi Lubis. (2023). 563-Article Text-5475-2-10-20230402. *JURNAL SYNTAX DMIRATION*, 4, 27782–7782.
- Ayu, O. ;, Salim, O., Dera, R., & Rawi, P. (n.d.). PENGARUH JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT SUMBER ABADI INDONESIA CABANG KOTA SORONG PAPUA BARAT. In *Jurnal Ilmiah Manajemen EMOR (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)* (Vol. 3, Issue 2).
- Fadia Siwi, A. (2023). PENTINGNYA SOSIALISASI DALAM MENINGKATKAN AWARENESS PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA MASYARAKAT DI SURABAYA. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2). https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index
- Febrianti, L., Wahyu Syarvina, J.;, Program, J, Manajemen, S., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (n.d.). Analysis of the Ease of the JKK (Work Accident Insurance) Claim Procedure on Service Satisfaction at BPJS Ketenagakerjaan, Medan Utara Branch Analisis Kemudahan Prosedur Klaim JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) terhadap Kepuasan Pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Utara. In *Jurnal Fokus Manajemen* (Vol. 2, Issue 1). <http://bpjsketenagakerjaan.go.id>
- Islam, U., Sunan, N., & Surabaya, A. (n.d.). Nafila Rizkia Khaldi. *Journal of Economic Welfare*, 03. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/asnaf>
- Jurnal, P., Masyarakat, K., & Sutrisno, H. (2020). *PENGARUH BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA*. 4(1).
- Kusuma, M., Triana, Y., & Lancang Kuning Pekanbaru, U. (2024). *PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TENAGA MEDIS TERHADAP KEWENANGAN PENILAIAN CACAT AKIBAT KECELAKAAN KERJA*. 5(1).
- Nur Fath-Hiah, W., & Azizaton Nafi, B. (n.d.). *SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA PEDAGANG SENTRA WISATA KULINER (SWK) SIOLA KOTA SURABAYA* (Vol. 1, Issue 2).
- Pratiwi, P. D., Fauzi, A., Gumelar, P. P., Ramdhani, R., Sasono, A., & Asmoroningtyas, T. (n.d.). *Program BPJS Ketenagakerjaan dalam Menjamin Keselamatan dan Kesehatan Karyawan (Literature Review)*. <https://doi.org/10.31933/jjmt.v4i6>
- Prihantini, M. B. M., & Sarjana, I. M. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 10(10), 2213. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i10.p01>
- Purba, Y. A., Aini, Y. N., Asiati, D., & Ngadi, N. (2021). Kesenjangan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia : Analisis Data Sakernas 2018. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 15(2). <https://doi.org/10.47198/naker.v15i2.72>
- Rini, P., Ulvi, L., & Ayu P. (2023). Implementasi Perlindungan Hak Pekerja terkait Kecelakaan Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 270–285. <https://doi.org/10.59581/depositi.v1i4.1873>
- Salahuddin, S., Pasuruan, W., Jaminan, P., Ketenagakerjaan, S., Kesejahteraan, D., Khofifah, N., Bakhri, S., Wahyudi, I., Tinggi, S., Islam, A., & Pasuruan, S. (n.d.). *JIEB: JURNAL ILMIAH EKONOMI BISNIS*. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Saputra, A. W., Al Falah, P., & Candra, M. (2024). Peran BPJS Ketenagakerjaan Kota Tanjungpinang Terhadap Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Relasi Publik*, 2(1), 115–123. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2103>
- Supadmo, H. (2023). Peran Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja (Jkk). *Borneo Law Review*, 6(2), 205–218. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3243>
- Tsabitah, A. F., & Hoesin, H. S. H. (2024). Perlindungan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(2), 789–802. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i2.2619>

Waliyuddin Zakiy, M., & Azizatun Nafi, B. (n.d.). *Sosialisasi Program Jamnian Sosial Ketenagakerjaan Kepada UMKM Di Kelurahan Semolowaru Kota Surabaya oleh BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Tanjung Perak*. 1(2), 2964–2795.
<https://doi.org/10.556442>